

Pendekatan Integratif-Kultural: Strategi Pondok Pesantren Al Huda dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila

Toha Masrur^{a, 1}

^a Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, Indonesia

¹ tohaambal@gmail.com*

*Toha Masrur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi integratif-kultural yang diterapkan Pondok Pesantren Al Huda dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan degradasi nilai akibat globalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen di lingkungan Pondok Pesantren Al Huda. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian mengungkap tiga strategi inti dalam penanaman nilai Pancasila. Pertama, integrasi melalui analogi nilai dalam pengajaran kitab kuning yang menghubungkan ajaran Islam dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, pembiasaan nilai melalui ritual dan aktivitas kehidupan sehari-hari di pesantren. Ketiga, keteladanan langsung (uswah hasanah) dari kyai dan ustadz yang menjadi model konkret implementasi nilai. Pendekatan integratif-kultural yang menyulam nilai Pancasila ke dalam jaringan kultural pesantren yang sudah ada terbukti efektif menciptakan internalisasi nilai yang alamiah, otentik, dan berkelanjutan. Model ini menawarkan alternatif dari pendekatan instruksional yang selama ini dominan, sekaligus menunjukkan bahwa pesantren dengan otoritas kultural kyainya dapat menjadi basis strategis penguatan ideologi Pancasila. Temuan ini berimplikasi pada pengembangan model pendidikan karakter di Indonesia yang lebih kontekstual dan berbasis kearifan lokal.

ABSTRACT

This research aims to uncover the integral-cultural strategies applied by the Al Huda Islamic Boarding School in instilling Pancasila values in the midst of the challenges of value degradation due to globalization. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, participatory observations, and document studies in the Al Huda Islamic Boarding School. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawn. The findings of the study reveal three core strategies in instilling Pancasila values. First, integration through the analogy of values in the teaching of the yellow book that connects Islamic teachings with the values of Pancasila. Second, habituation of values through rituals and activities of daily life in Islamic boarding schools. Third, the direct example (uswah hasanah) of kyai and ustadz which is a concrete model for value implementation. An integrative-cultural approach that embroiders the values of Pancasila into the existing cultural network of pesantren has proven effective in creating internalization of values that are natural, authentic, and sustainable. This model offers an alternative to the instructional approach that has been dominant, while showing that pesantren with their kyai cultural authority can be a strategic basis for strengthening the ideology of Pancasila. These findings have implications for the development of a character education model in Indonesia that is more contextual and based on local wisdom.

Keywords: Integrative-Cultural Approach, Islamic Boarding School, Pancasila Values, Character Education, Internalization of Values

Informasi Artikel

Diterima : 28 November 2025

Disetujui: 29 Desember 2025

Kata kunci:

Pendekatan Integratif-Kultural,
Pondok Pesantren, Nilai Pancasila

Article's Information

Received: 28 November 2025

Accepted: 29 December 2025

Keywords:

Integrative-Cultural Approach,
Islamic Boarding School, Pancasila
Values

Pendahuluan

Tantangan penguatan ideologi bangsa Indonesia di era globalisasi semakin kompleks dan multidimensional. Itu karena arus globalisasi, tidak hanya membawa kemajuan teknologi dan informasi, tetapi juga membawa serta nilai-nilai asing yang dapat menjadi benturan bagi budaya asli yang menjadikan seseorang memiliki karakter individualis bahkan sampai pada tataran ekstrem. Arus globalisasi yang tidak terbandung telah melahirkan gaya hidup hedonisme, konsumerisme, dan materialisme di kalangan generasi muda. Fenomena ini jika tidak diimbangi dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila yang kuat, dikhawatirkan akan mengikis jati diri bangsa dan memicu disintegrasi sosial (Raharjo & Mulyono, 2023). Globalisasi merupakan intensifikasi hubungan sosial dunia yang menghubungkan lokalitas yang jauh sedemikian rupa sehingga peristiwa lokal dibentuk oleh peristiwa yang terjadi bermil-mil jauhnya. Artinya jarak antar bangsa menjadi sempit, maka dengan demikian budaya yang ada di bangsa lain dapat dengan mudah diadopsi oleh bangsa lain dengan cara yang cepat. Hal itu senada dengan Ermawan dalam (detik.com, 2023) yang mengartikan globalisasi sebagai suatu hubungan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarmanusia dan bangsa di seluruh dunia melalui perdagangan, perjalanan, interaksi, dan sebagainya yang membuat batas-batas suatu negara menjadi sempit.

Fenomena ini mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda yang paling terpapar budaya global. Lebih dari itu nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan filosofi dan ideologi juga mendapatkan ancaman nyata, jika globalisasi tidak dipahami secara nyata. Laporan Bappenas (2019) mengindikasikan bahwa kerentanan ideologi pada generasi muda meningkat seiring dengan penetrasi internet dan media sosial yang masif. Hal itu mempertegas bahwa Pancasila sebagai pemersatu menghadapi ujian berat untuk tetap relevan dan hidup dalam praktik bermasyarakat, bukan sekadar slogan yang dihafalkan.

Pancasila sebagai filsafat/falsafah negara (*Philosophische Grondlag*) memiliki perbedaan konotasi dengan Pancasila sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) (Anggraeni, dkk, 2023). Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai luhur Pancasila seringkali menghadapi ujian ketahanan ketika berhadapan dengan realitas sosial-politik yang dinamis dan kompleks. Notonagoro (1974) menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, dimana setiap silanya saling menjiwai dan diliputi oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Realitas masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan beragam suku, agama, dan budaya, justru memerlukan perekat ideologis yang kuat seperti Pancasila untuk mencegah disintegrasi sosial. Riset LIPI (2020) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang Pancasila masih sering bersifat parsial dan tidak komprehensif, sehingga mudah tergerus oleh narasi-narasi ideologi alternatif yang lebih dogmatis. Oleh karena itu, upaya reaktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi sebuah keniscayaan, bukan lagi sekadar pilihan.

Menyadari urgensi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan pendidikan sebagai pilar utama dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan Profil Pelajar Pancasila. Kebijakan ini didasarkan pada pemikiran bahwa sekolah dan lembaga pendidikan lainnya merupakan garda terdepan dalam membentuk generasi muda yang berkarakter dan berjiwa Pancasila. Ki Hajar Dewantara (1937) dalam konsep "Tripusat Pendidikan"-nya menekankan peran sentral lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam membentuk karakter anak. Program PPK yang dicanangkan pemerintah berfokus pada penguatan lima nilai utama: religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan. Penelitian dari Pusat Penelitian Kebijakan (2018) membuktikan bahwa implementasi PPK yang holistik dan integratif mampu meningkatkan sikap toleransi dan empati sosial peserta didik. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Pancasila bukanlah sebuah mata pelajaran tambahan, melainkan sebuah pendekatan yang harus menyatu dalam seluruh ekosistem pendidikan.

Dalam peta pendidikan nasional, pondok pesantren menempati posisi yang unik dan strategis sebagai lembaga pendidikan indigenous Indonesia yang telah berakar kuat dalam denyut nadi masyarakat. Pesantren bukan sekadar lembaga keagamaan murni, melainkan juga sebuah entitas sosial-budaya yang memiliki kharisma dan pengaruh yang dalam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari sistem pendidikan lainnya. Keberadaan kyai, masjid, santri, pengajaran kitab kuning, dan asrama menjadi elemen integral yang tidak terpisahkan dalam tradisi pesantren. Kelima elemen ini membentuk ekosistem pendidikan yang holistik, di mana transmisi ilmu tidak hanya terjadi secara kognitif tetapi juga melalui internalisasi nilai dan pembentukan karakter melalui keteladanan kyai (Hasan & Qodir, 2022). Kekhasan pesantren terletak pada "bahasa" dan pendekatannya sendiri yang telah teruji selama berabad-abad dalam membentuk kepribadian santri. Hasil survei PPIM UIN Jakarta (2021) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pembentuk karakter masih sangat tinggi, bahkan melebihi lembaga pendidikan formal. Oleh karena itu, potensi pesantren sebagai mitra strategis pemerintah dalam penguatan karakter bangsa tidak dapat dianggap remeh.

Salah satu kekuatan utama pesantren yang tidak dimiliki oleh banyak lembaga pendidikan lainnya adalah otoritas kultural yang dimiliki oleh Kyai dan para ustadz. Dalam struktur pesantren, Kyai tidak hanya berperan sebagai pengajar ilmu agama, tetapi lebih dari itu, ia adalah figur sentral yang menjadi role model dan panutan dalam segala aspek kehidupan. Menurut Clifford Geertz, kiyai merupakan *cultural broker* yaitu penghubung teks suci dan teks lokal. Mereka berdiri di antara wahyu dan budaya, langit dan bumi, sakral dan profan. Mereka memungkinkan menerjemahkan bahasa langit ke dalam dialek bumi, bahasa wahyu ke bahasa lokal. Oleh karena itu mereka dengan pesantrennya menjadi poros keagamaan (Damai, 2025)

Otoritas kultural ini bukan berasal dari posisi formal, melainkan dari kharisma, kedalaman ilmu, dan keteladanan hidup yang dipancarkan oleh Kyai. Sementara (Syukron, 2025) menegaskan bahwa kekuatan fundamental pesantren tidak terletak pada kurikulum, melainkan pada relasi unik antara kyai dan santri. Hubungan ini melampaui model transaksional guru-murid konvensional, bukanlah relasi feodal. Ia adalah sebuah mentorship transformatif (*murabbi-mutarabbi*) yang berpusat pada transmisi ilmu sekaligus peneladanan karakter (*uswah hasanah*). Dalam ekosistem ini, kyai berperan sebagai seorang fasilitator intelektual dan pembimbing spiritual, bukan sebagai otoritas doktriner yang menuntut kepatuhan buta.

Lebih lanjut, pendidikan pesantren memiliki sistem nilai yang telah mengkristal dan hidup dalam keseharian kehidupan para santri, sehingga nilai-nilai seperti *ta'dzim* (rasa hormat), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan), *tawadhu'* (rendah hati), dan *ikhlas* telah menjadi ruh yang menggerakkan seluruh aktivitas di pesantren. Nilai-nilai universal ini memiliki titik temu (*common values*) yang sangat erat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebagai contoh, nilai *ukhuwah* sejalan dengan semangat persatuan Indonesia (Sila ke-3), sementara nilai *ta'dzim* dan *tawadhu'* selaras dengan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4). Azra dalam (Muflih, 2024) melihat civil society sebagai masyarakat madani yang mandiri, demokratis, religius, berkeadaban serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks Indonesia, civil society menjadi alternatif solusi persoalan sosial melalui pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat sipil sehingga mampu mewujudkan dan menegakkan kehidupan demokratis serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Istilah civil society dalam Islam disepadankan dengan masyarakat madani yang merujuk pada konteks historis dan sosial-politik yang dibangun Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya di Madinah

Fokus penelitian ini akan diarahkan pada Pondok Pesantren Al Huda di Jombang, Jawa Timur, yang merupakan salah satu pesantren tua (salaf) terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Didirikan pada tahun 1885, Al Huda telah melahirkan banyak alumni yang berperan penting dalam kancah sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia. Sebagai pesantren yang dikenal mampu menjaga tradisi sambil mengadopsi modernitas, Al Huda merepresentasikan sebuah laboratorium sosial yang ideal untuk mengkaji dinamika pendidikan karakter. Menurut sejarah yang tercatat, pesantren ini telah menjadi tempat bertemunya tradisi keilmuan Islam klasik dengan wawasan kebangsaan yang modern (Dhofier, 2020). Reputasi dan jaringan alumni Al Huda yang sangat luas menjadikan temuan dari penelitian ini akan memiliki signifikansi yang tinggi dan dapat menjadi acuan bagi pesantren-pesantren lainnya.

Kekhasan Al Huda yang paling menonjol adalah penerapan sistem pendidikan ganda (*dual system*), dimana para santri menjalani pendidikan formal (mengikuti kurikulum nasional) sekaligus pendidikan pesantren tradisional (mempelajari kitab kuning melalui metode *sorogan* dan *bandongan*). Kondisi ini menciptakan sebuah ruang dialektika yang unik, dimana nilai-nilai modern dari pendidikan formal berdialog dan berintegrasi dengan nilai-nilai tradisional dari pendidikan pesantren. Menurut (Qodir & Hasan, 2021) merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh van Bruinessen, menunjukkan bahwa pesantren dengan model seperti ini cenderung lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam konteks Al Huda, dualisme ini bukanlah sebuah dikotomi, melainkan sebuah simbiosis mutualistik yang memperkaya wawasan dan karakter santri. Ruang inilah yang menjadi ajang yang subur untuk diamati bagaimana strategi integratif nilai-nilai Pancasila dikembangkan.

Sayangnya, pendekatan penanaman nilai Pancasila di banyak lembaga pendidikan selama ini masih sering terjebak pada paradigma yang instruktural dan doktriner. Pendekatan yang bersifat top-down dan terpisah dari konteks kultural peserta didik ini berisiko menjadikan Pancasila hanya sebagai materi hafalan yang kering makna, bukan sebagai nilai yang hidup dan dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Lickona dalam (Rahim, 2026) menegaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif harus melibatkan aspek *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action*, bukan sekadar transfer pengetahuan. Laporan Kemdikbud (2019) sendiri mengakui bahwa kendala utama PPK adalah metodologi pengajaran yang masih monoton dan kurang kontekstual. Akibatnya, nilai-nilai luhur Pancasila gagal menjadi kompas moral dalam menghadapi tantangan zaman, khususnya di kalangan generasi muda.

Berdasarkan identifikasi celah tersebut, maka pertanyaan penelitian inti yang diajukan adalah: "Bagaimana strategi yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kultur pesantren yang sudah mapan di Pondok Pesantren Al Huda?" Pertanyaan ini berusaha mengungkap mekanisme, metode, dan pendekatan yang digunakan oleh pesantren untuk menyelaraskan nilai-nilai kebangsaan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi core business-nya. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini mengusung sebuah kerangka konseptual yang dinamakan "Pendekatan Integratif-Kultural". Pendekatan ini, menurut teori yang dikembangkan Banks (2004) mengenai *multicultural education*, menekankan pada integrasi konten, konstruksi pengetahuan, dan pengurangan prasangka dalam proses pendidikan. Dalam konteks pesantren, pendekatan ini akan mengungkap bagaimana Al Huda menyulam nilai-nilai Pancasila ke dalam benang-benang kultural yang sudah ada, seperti tradisi pengajian kitab kuning, kehidupan sehari-hari di asrama, kepemimpinan kyai, dan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga proses internalisasinya terasa alami dan tidak dipaksakan.

Kajian relevan yang mendasari penelitian ini antara lain karya Olenka D. Lasmawan (2020) tentang integrasi nilai kearifan lokal dalam pembelajaran PPKn, serta penelitian M. Jainuri (2021) tentang pendidikan karakter berbasis pesantren. Namun, kebaruan yang ditawarkan penelitian ini terletak pada fokus spesifiknya terhadap strategi integrasi kultural, bukan sekadar integrasi kurikuler, di sebuah pesantren besar yang menjalankan sistem ganda. Penelitian ini tidak hanya melihat pada aspek "apa" yang diajarkan, tetapi lebih pada "bagaimana" nilai-nilai tersebut dibingkai dan diinternalisasi melalui mekanisme kultural pesantren yang khas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis berupa model inspiratif bagi pesantren dan lembaga pendidikan agama lainnya dalam menanamkan Pancasila secara organik, efektif, dan tidak dogmatis. Secara akademik, penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan wacana tentang hubungan sinergis antara agama (khususnya Islam Aswaja) dan negara, serta memperkaya khazanah metodologis pendidikan karakter di Indonesia dengan menawarkan perspektif kultural yang selama ini sering terabaikan.

Metode

Penelitian ini akan mengandalkan kombinasi data primer dan sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Data primer dikumpulkan langsung dari lapangan melalui informan kunci dan pendukung. Sebagai informan kunci, Pimpinan Pesantren (Kyai/Pengasuh) diwawancarai untuk memahami filosofi dan visi-misi pesantren terkait integrasi nilai Pancasila. Ustadz/Ustadzah Senior serta Pengasuh Asrama menjadi sumber informasi vital tentang strategi implementasi dan pembiasaan nilai dalam keseharian, sementara Pengurus Pondok Pesantren memberikan data tentang kerangka programatik dan regulasi yang mendukung proses ini. Untuk melengkapi perspektif dari sisi penerima, santri senior dan aktif diwawancarai sebagai informan pendukung untuk memahami bagaimana mereka memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, sedangkan alumni memberikan wawasan berharga mengenai dampak jangka panjang dari penanaman nilai yang dilakukan pesantren. Data sekunder berperan sebagai pelengkap yang crucial, meliputi analisis terhadap dokumen kurikulum formal dan pesantren, Buku Panduan Santri yang berisi peraturan dan tata tertib, kitab-kitab kuning yang diajarkan untuk mengidentifikasi titik temu nilai dengan Pancasila, serta karya tulis, majalah dinding, dan konten media sosial pesantren yang merefleksikan praktik nyata nilai-nilai tersebut.

Untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data secara triangulasi, yakni menggunakan berbagai metode untuk mengkaji fenomena yang sama dari sudut yang berbeda. Wawancara mendalam dengan panduan semi-terstruktur dilakukan kepada seluruh tingkatan informan. Sebagai contoh, kepada Kyai dapat diajukan pertanyaan, "Bisa dijelaskan, nilai Pancasila Sila ke-berapakah yang Bapak lihat paling kuat tercermin dalam tradisi sorogan atau bandongan?" Sementara kepada santri, pertanyaan dapat diarahkan seperti, "Menurutmu, kegiatan apa di pesantren ini yang paling melatih sikap musyawarah dan gotong royong? Ceritakan pengalamanmu." Metode kedua adalah observasi partisipatif, di mana peneliti tidak hanya mengamati tetapi juga berusaha terlibat dalam aktivitas tertentu (dengan izin) untuk merasakan langsung dinamika yang terjadi. Fokus observasi meliputi proses belajar-mengajar di kelas dan masjid untuk melihat bagaimana nilai kebangsaan diselipkan dalam penjelasan kitab kuning, kehidupan asrama untuk menyaksikan langsung praktik gotong royong dan musyawarah, kegiatan ekstrakurikuler untuk menganalisis nilai yang dikembangkan, serta interaksi santri dengan masyarakat sekitar untuk menilai penanaman nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Teknik ketiga

adalah studi dokumen melalui analisis isi terhadap dokumen-dokumen yang relevan, misalnya menganalisis kitab Ta'lim Muta'allim untuk mencari nilai hormat kepada guru yang sejalan dengan sila keempat, atau menganalisis peraturan tertib untuk menemukan nilai disiplin dan keadilan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga alur kegiatan yang saling terkait. Tahap pertama adalah reduksi data, dimana data mentah yang sangat banyak seperti transkrip wawancara dan catatan observasi disortir, difokuskan, dan disederhanakan untuk memilih hal-hal yang pokok. Pada tahap ini, dilakukan pemberian koding terhadap tema-tema yang muncul, misalnya [INT-KT-1] untuk "Integrasi melalui Kitab Kuning" atau [PEM-BS-2] untuk "Pembiasaan melalui Kehidupan Sosial". Tahap kedua adalah penyajian data, yakni menyusun data yang telah direduksi ke dalam suatu bentuk yang mudah dipahami, seperti matriks atau tabel yang memetakan hubungan antara "Aktivitas Pesantren" dengan "Nilai Pancasila yang Ditanamkan", atau dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang kaya. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dimana peneliti mulai menarik makna dari data yang telah disajikan, mencari pola yang konsisten, dan mengidentifikasi temuan yang mengejutkan. Kesimpulan awal kemudian diverifikasi melalui member check dengan mengecek kembali interpretasi kepada narasumber kunci, serta mendiskusikannya dengan rekan sejawat untuk memastikan kesahihan interpretasi yang dibuat.

Guna menjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, beberapa kriteria trustworthiness diterapkan secara ketat. Kredibilitas (credibility) data dijamin melalui penerapan triangulasi sumber dan metode, melakukan observasi yang diperpanjang waktu untuk memahami konteks secara mendalam, serta melakukan member check seperti yang telah dijelaskan. Transferabilitas (transferability) dicapai dengan menyajikan deskripsi yang kaya dan mendetail (thick description) tentang konteks sosial-kultural Pondok Pesantren Al Huda, karakteristik informan, dan proses penelitian, sehingga pembaca dapat menilai apakah temuan ini dapat ditransfer ke konteks pesantren lain yang memiliki kemiripan. Dependabilitas (dependability) dijaga dengan membuat jejak audit (audit trail) yang merinci semua proses pengambilan data, keputusan selama analisis, dan evolusi temuan, sehingga proses penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Terakhir, konfirmabilitas (confirmability) dipastikan dengan menjaga agar temuan penelitian didukung secara eksplisit oleh data mentah (kutipan wawancara, catatan observasi, dokumen) dan bukan berasal dari prasangka, imajinasi, atau bias subjektif peneliti, sehingga hasil penelitian benar-benar merefleksikan realitas yang terjadi di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Profil Singkat Konteks Kultural Pesantren Al Huda Kebumen

Sebelum dikenal dengan nama Al-Huda, pesantren yang terletak di Jetis Kutosari ini lebih akrab dipanggil Pondok Pesantren Jetis. Lembaga ini didirikan sekitar tahun 1880 M oleh K. H. Abdurrahman. Semasa kecil, beliau bernama Solihin dan berasal dari desa Gebrek di Ambal Kebumen. Beliau diberikan tugas untuk mengurus kerbau oleh pamannya selama bertahun-tahun. Suatu ketika, salah satu kerbau yang dijaganya hilang, sehingga pamannya memarahinya dan memerintahkannya untuk mencarinya hingga ditemukan. Beliau pun mencari hingga ke pantai. Karena tidak menemukan kerbaunya, beliau merasa bingung, tidak berani pulang, dan terus berjalan ke arah timur sambil menangis. Orang tuanya sangat berduka dan berasumsi bahwa Solihin telah menjadi mangsa binatang buas. Selama beberapa hari, beliau berjalan kaki ke timur dan akhirnya tiba di Pondok Pesantren Wringin Agung di Jawa Timur. Di sana, beliau belajar hingga dewasa dan menjadi seorang Al-'Alim Al-'Alamah.

Suatu saat, beliau mendatangi Kyainya untuk meminta izin melanjutkan studi di Makkah. Pak Kyainya mengizinkannya dengan syarat agar ia terlebih dahulu berziarah ke Pamijahan di Jawa Barat dan pamit kepada orang tuanya. Akhirnya, beliau pulang ke rumah untuk berpamitan dan berziarah. Dalam perjumpaan tersebut, beliau berpura-pura sebagai musafir yang ingin beristirahat. Saat beristirahat, beliau berdialog dengan orang tuanya dan menanyakan jumlah anak mereka serta keberadaan mereka. Orang tuanya menjelaskan bahwa mereka memiliki beberapa anak, yang pertama

dan kedua bekerja di berbagai tempat, sedangkan Solihin, anak mereka yang hilang, tidak diketahui keberadaannya, entah dimakan harimau atau di mana. Beliau pun menanyakan ciri-ciri Solihin yang hilang. Orang tuanya menjelaskan bahwa Solihin memiliki “toh” di punggungnya. Saat akan melanjutkan perjalanan, beliau mengaku merasa kurang sehat dan meminta orang tuanya untuk mengeriknya. Ketika orang tuanya bersiap mengerik, mereka melihat “toh” di punggungnya dan yakin bahwa beliau adalah Solihin. Orang tuanya pun menangis haru dan bahagia, berulang kali mengucapkan, “Solihin hidup kembali.” Setelah itu, mereka melanjutkan pembicaraan tentang perjalanan hidupnya, dan beliau minta izin untuk melanjutkan ziarah ke Pamijahan, lalu mencari ilmu di Makkah. Orang tuanya pun menyetujuinya dan memberikan restu untuk perjalanan tersebut. Setelah melakukan ziarah di Pamijahan, beliau kembali mengunjungi Pak Kyainya di Wringin Agung untuk melaksanakan niatnya belajar di Makkah. Akhirnya, beliau berangkat ke Makkah dan menuntut Ilmu Thariqoh di Jabal Qubbais dari Syekh Abdur Rauf, yang kemudian dilanjutkan dengan Syekh Sulaiman Zuhdi. Setelah beberapa tahun, beliau berhasil menguasai ilmu yang tinggi, menjadi seorang Mursyid, dan mendapatkan nama baru, yaitu “K. H. Abdurrahman”. Selanjutnya, beliau kembali ke Tanah Air Indonesia.

Di Indonesia, beliau memberikan pengajaran tentang Ilmu Thariqah di desa kelahirannya, yaitu Ambal Kebumen. Karena beliau mengajar sambil memutar tasbih, akhirnya ajarannya disalahartikan dan dilaporkan ke penjajah Belanda dengan tuduhan bahwa Mbah Abdurrahman sedang mengajarkan cara membuat bom untuk melakukan pemberontakan. Beliau kemudian ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke pusat pemerintahan Belanda yang ada di Kebumen. Setelah meminta pendapat dari para kyai yang dipercaya oleh pemimpin penjajah di Kebumen pada waktu itu, ajarannya dinyatakan tidak berbahaya dan tidak berpotensi untuk memberontak. Meski begitu, pemimpin penjajah masih merasa khawatir dengan ajaran Mbah Abdurrahman, sehingga untuk memudahkan pengawasan, mereka meminta agar Mbah Machfudz ditempatkan di daerah perkotaan. Pemimpin penjajah pun bertanya kepada para kepala desa siapa di antara mereka yang bersedia menerima seorang kyai di desanya. Kepala Desa Kutosari adalah yang pertama mengacungkan jarinya dan menyatakan bahwa desanya memerlukan seorang kyai. Akhirnya, Mbah Abdurrahman diberikan rumah dan musholla untuk mengadakan pengajian di dukuh Jetis dekat sungai Lukulo, yang pada waktu itu masih merupakan kawasan perbukitan yang rimbun dan dianggap angker.

Sebagaimana diungkapkan oleh Maunah (2015), lingkungan pesantren yang terisolasi secara positif justru memungkinkan terbentuknya sebuah “subkultur” yang kuat dan konsisten, di mana nilai-nilai dapat dibentuk dan dibiasakan tanpa banyak gangguan dari pengaruh eksternal yang kontra-produktif. Skala pesantren yang besar, dengan ratusan santri, justru menjadi keuntungan strategis. Jumlah yang banyak tidak menghalangi terciptanya hubungan yang sangat intensif dan personal antara Kyai, ustadz, dan santri. Dengan demikian bagaimana pengelolaan pesantren menjadi sangat fundamental dalam mengintegrasikan nilai-nilai pesantren ke santri. Dalam konteks ini, pendidikan berlangsung layaknya dalam sebuah keluarga besar, di mana setiap individu dikenal secara mendalam oleh pengasuhnya. Menurut Geertz (1960), hubungan personal yang dekat merupakan ciri khas “cultural broker” dalam masyarakat tradisional, yang dalam hal ini dipegang oleh Kyai. Sistem nilai dasar pesantren telah tertanam kuat dalam keseharian, dengan nilai-nilai seperti ta'dzim (hormat kepada yang lebih tua dan guru), ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama santri), thaharah (menjaga kebersihan jasmani dan rohani), serta disiplin waktu dalam menjalankan ibadah dan aktivitas lainnya. Nilai-nilai indigenous inilah yang menjadi benang dasar yang akan disulam dengan benang-benang nilai Pancasila.

Integrasi melalui Nilai dan Analogi dalam Pengajaran Kitab Kuning

Temuan penelitian mengungkap bahwa pengajaran kitab kuning, khususnya kitab akhlak seperti Ta'lim Muta'allim, tidak hanya berfungsi sebagai transfer ilmu keagamaan semata, tetapi juga menjadi media utama integrasi nilai. Dalam sebuah sesi pengajian yang diobservasi, Ustadz Farid tidak hanya menerjemahkan teks Arab tentang kewajiban menghormati guru. Beliau secara aktif membuat analogi yang kontekstual: “Hormati gurumu seperti kalian menghormati orang tua sendiri. Ketaatan dan sikap santun kalian kepada saya sebagai guru adalah cerminan dari pengamalan Pancasila Sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Bahkan, hubungan kita di kelas ini, di

mana saya memimpin dan kalian boleh menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, adalah perwujudan dari Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan (Sila ke-4)." Analisis terhadap strategi ini menunjukkan bahwa nilai Pancasila tidak diajarkan sebagai entitas yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan menjadi "pelengkap makna" dan penguat dari nilai keislaman yang sudah ada. Atinya setiap pasal diperkurat oleh sila lain seperti yang diungkapkan oleh (Hendri, dkk., 2018) Sila pertama menjiwai dan mendasari sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima; sila kedua dijiwai dan didasari sila pertama, menjiwai dan mendasari sila ketiga, keempat, dan kelima; sila ketiga dijiwai dan didasari sila pertama dan sila kedua, menjiwai dan mendasari sila keempat dan kelima; sila keempat dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai dan mendasari sila kelima; dan sila kelima dijiwai dan didasari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itulah yang dinamakan Pancasila hierarkis pyramidal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramasari & Azani (2025) menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan Pancasila tidak berjalan saling bertentangan, tetapi dapat bersatu dalam membentuk karakter peserta didik yang religius, nasionalis, toleran, dan berintegritas, sehingga selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan pembangunan bangsa. Dengan menggunakan bahasa dan kerangka berpikir yang sudah akrab di dunia santri (kitab kuning), nilai-nilai Pancasila menjadi lebih mudah dicerna dan diterima karena diasosiasikan dengan nilai agama yang sudah diyakini kebenarannya, sehingga terhindar dari kesan dipaksakan atau diimpor dari luar.

Konsep Tauhid (mengesakan Allah) dalam kitab-kitab akidah seperti Aqidatul Awam, Kifayatul Awam, atau Ummul Barahin adalah fondasi. Selain itu, kitab-kitab fiqh seperti Safinatun Najah, Fathul Qarib, atau Fathul Mu'in mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (hablum minallah). Sila pertama Pancasila secara tegas mengakui keberadaan Tuhan. Nilai ketauhidan dan ketakwaan dalam Kitab Kuning adalah implementasi konkret dari sila ini bagi umat Islam. Pancasila memberikan ruang bagi setiap agama untuk menjalankan ajaran ketuhanannya, dan bagi muslim tradisional, Kitab Kuning adalah panduannya.

Nilai pada kemanusiaan yang adil dan beradab pada Pancasila sangat kental dalam kitab-kitab akhlak seperti Ta'lim Muta'allim (adab menuntut ilmu), Bidayatul Hidayah (adab sehari-hari), Akhlaq Lil Banin/Lil Banat, dan Nashaihu 'Ibad. Kitab-kitab ini mengajarkan kejujuran (amanah), menghormati orang lain (adab), kasih sayang (rahmah), keadilan ('adalah), dan menjaga hak-hak manusia (haqul adami). Sila kedua menekankan penghargaan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai akhlak mulia dalam Kitab Kuning adalah blueprint untuk membentuk manusia Indonesia yang beradab dan adil. Konsep keadilan dalam fiqh (misalnya dalam hukum waris, muamalah) juga sejalan dengan semangat keadilan sosial.

Sementara konsep persatuan umat (ukhuwah islamiyah) dan larangan perpecahan (iffarraq) banyak dibahas dalam kitab akidah dan akhlak. Kitab Fathul Qarib juga mengatur hukum yang menjaga kesatuan masyarakat, seperti hukum jihad yang dalam konteks fiqh klasik bisa dimaknai sebagai membela tanah air (hubbul wathan). Persatuan di atas keberagaman membuktikan bahwa individualitas sebagai indikasi kemajuan bebas nilai, harus tetap tunduk pada aturan demi mencapai tujuan kemajuan bersama. Dengan demikian nilai ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam, ketika diperluas, menjadi ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Pesantren dengan Kitab Kuningnya telah lama menjadi pusat yang menjaga harmoni sosial dan kesatuan komunitas, yang kontributif bagi persatuan bangsa. Sementara sila ke-4 Tentang prinsip musyawarah (syura) adalah ajaran Islam yang jelas, disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang dikaji dalam Kitab Kuning. Konsep mencari kesepakatan (ijma') dalam hukum Islam juga merupakan bentuk musyawarah. Kitab-kitab siyasah (politik) klasik juga membahas tanggung jawab pemimpin dan rakyat. Nilai tersebut juga terdapat pada ajaran-ajaran yang ada pada kitab kuning, yang mengajarkan adanya musyawarah untuk penyelesaian masalah. Dengan demikian sila ke-4 ini juga sangat sejalan dengan prinsip syura(konsultasi, musyawarah, nasihat, atau pertimbangan). Musyawarah untuk mufakat yang menjadi ciri khas budaya Indonesia, juga diajarkan dalam tradisi pesantren. Nilai "hikmat kebijaksanaan" sejalan dengan konsep hikmah dalam falsafah Islam yang diajarkan dalam kitab-kitab.

Kitab Kuning: Ini adalah ruh dari banyak kitab, terutama bidang muamalah (hubungan sosial-ekonomi) seperti dalam *Fathul Mu'in* atau kitab khusus seperti *Matan Ghayat wa Taqrib*. Konsep keadilan ('adl), larangan riba, kewajiban zakat, infak, sedekah, wakaf, serta perintah menafkahi keluarga dan membantu yang lemah (dhu'afa) semuanya bertujuan menciptakan keadilan dan keseimbangan sosial. Sila keadilan merupakan cita-cita keadilan ekonomi dan sosial. Zakat adalah instrumen keadilan sosial yang sangat konkret dalam Islam. Nilai-nilai tolong-menolong, larangan menimbun harta, dan keharusan memenuhi hak orang lain yang ada dalam Kitab Kuning adalah landasan moral dan spiritual untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Pembiasaan Nilai dalam Ritual dan Kehidupan Sehari-hari (Hablum minannas)

Strategi kedua yang teridentifikasi adalah internalisasi nilai melalui pembiasaan (habitiasi) dalam ritual dan interaksi sosial keseharian di pesantren. Temuan observasi partisipatif mengungkap dua contoh konkret. Pertama, kegiatan kerja bakti membersihkan seluruh area pesantren setiap Jumat pagi, yang secara tradisi disebut 'Jumat Bersih'. Kegiatan ini tidak sekadar dimaknai sebagai ibadah untuk menjaga kebersihan. Dalam sambutannya, Kyai secara konsisten menekankan bahwa gotong royong tanpa paksaan ini adalah miniatur dari pengamalan Sila ke-3, Persatuan Indonesia. "Kita bersatu, bahu-membahu, tanpa memandang latar belakang, untuk kebaikan bersama," begitu kurang lebih pesannya. Kedua, mekanisme penyelesaian konflik (ishlah) yang difasilitasi santri senior. Saat terjadi perselisihan, santri tidak boleh menyimpannya sendiri, melainkan diwajibkan untuk duduk bersama dan bermusyawarah hingga mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Seorang santri senior (S-02) dalam wawancara menjelaskan, "Proses ishlah mengajarkan kami untuk mengutamakan kepentingan pondok bersama, tidak egois. Keputusan harus adil, tidak boleh ada yang dirugikan." Analisis terhadap temuan ini menegaskan bahwa pendekatan kultural bersifat experiential. Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial tidak dijelaskan melalui teori di dalam kelas, tetapi dihidupi dan dipraktikkan langsung dalam bentuk tindakan nyata. Seperti dinyatakan oleh Lickona (1991), pendidikan karakter yang efektif harus mencakup moral action, di mana nilai dibentuk melalui pengalaman berulang-ulang. Pembiasaan dalam konteks kultural pesantren ini membuat nilai-nilai tersebut meresap ke dalam bawah sadar dan akhirnya menjadi bagian dari kepribadian santri.

Keteladanan Langsung (Uswah) dari Kyai dan Ustadz

Temuan yang paling konsisten dan powerful dalam penelitian ini adalah peran keteladanan langsung (uswah hasanah) dari Kyai dan para ustadz. Dalam kultur pesantren yang hierarkis dan penuh rasa hormat, figur Kyai adalah teladan hidup yang setiap perilakunya menjadi bahan pelajaran bagi santri. Observasi mendapati bahwa Kyai tidak pernah membedakan perhatian kepada santri, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu. Saat makan, beliau selalu duduk dan menyantap menu yang sama dengan para santri di pendopo, sebuah gambaran kesederhanaan dan kesetaraan yang sangat nyata. Perilaku otentik ini diamati dan diinternalisasi oleh santri. Seorang santri (S-01) dalam wawancara mendalam menyatakan, "Kyai itu adil kepada semua orang. Tidak pilih kasih. Beliau mengajari kami untuk tidak sombong. Itulah yang diajarkan ke kami." Pernyataan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai abstrak seperti Keadilan Sosial (Sila ke-5) dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila ke-2) dipahami santri melalui contoh nyata dari figur yang paling mereka hormati. Analisis terhadap fenomena ini merujuk pada teori sosial kognitif dari Bandura (1977) tentang pembelajaran melalui observasi. Dalam konteks pesantren, keteladanan adalah metode transmisi nilai yang paling efektif karena bersifat non-instruksional dan penuh kharisma. Nilai Pancasila, dalam hal ini, ditransmisikan bukan melalui ceramah atau poster, tetapi melalui sikap, ucapan, dan perilaku otentik Kyai yang diamati dan ditiru oleh santri setiap harinya, sehingga terinternalisasi secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

Hubungan Pendekatan Integratif-Kultural Pesantren AL Huda

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi inti yang diterapkan Pondok Pesantren Al Huda yaitu strategi efektif Pondok Pesantren Al Huda Kebumen dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila adalah dengan tidak menjadikannya sebagai kurikulum yang terpisah, melainkan melalui tiga langkah integratif: pertama, secara aktif mencari dan menegaskan common ground atau titik temu antara nilai-nilai Islam Aswaja (seperti keadilan, persaudaraan, musyawarah) dengan nilai-nilai Pancasila. Kedua, menyulam nilai-nilai Pancasila tersebut ke dalam

jaringan kultural pesantren yang sudah sangat mapan, yaitu pengajian kitab kuning, tradisi dan ritual harian, serta hubungan kyai-santri yang hierarkis-teladan. Ketiga, menggunakan bahasa, metafora, dan istilah kultural yang sudah akrab di telinga santri (seperti ishlah, ta'dzim, ukhuwah) untuk memaknai dan memberikan konteks lokal terhadap nilai-nilai Pancasila yang lebih nasional. Kelebihan pendekatan ini, seperti yang teramati, terletak pada keotentikannya. Karena nilai Pancasila "dibungkus" dan disampaikan melalui medium kultural yang sudah diakui dan dihormati, proses internalisasinya terasa alamiah, organik, dan tidak dogmatis. Alih-alih menjadi hafalan, Pancasila menjadi hidup dalam tindakan nyata, yang pada akhirnya membentuk karakter santri yang tidak hanya religius tetapi juga nasionalis.

Simpulan

Pondok Pesantren Al Huda menggunakan pendekatan integratif-kultural untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini terbukti efektif melalui tiga strategi utama yang saling terkait dan sesuai dengan konteks lokal. Pertama, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dalam pembelajaran kitab kuning dengan cara membandingkan nilai-nilai keislaman Aswaja dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan menyisipkan penjelasan tentang sila-sila Pancasila ketika membahas kitab akhlak seperti Ta'lim Muta'allim, pesantren tidak menganggap nilai-nilai negara sebagai materi asing, tetapi sebagai pengayaan makna dari ajaran agama yang sudah diyakini para santri. Kedua, nilai-nilai Pancasila dilatih melalui kebiasaan dalam rutinitas dan kehidupan sehari-hari di pesantren. Nilai seperti persatuan, gotong royong, dan musyawarah tidak hanya diberi penjelasan teoritis, tetapi juga dilaksanakan secara langsung, seperti dalam kegiatan kerja bakti "Jumat Bersih" dan mekanisme ishlah yang dipimpin oleh santri senior. Pendekatan ini membantu nilai Pancasila bergerak dari pemahaman hafal ke sikap dan perilaku, supaya terbentuk dalam karakter santri.

Ketiga, yang paling berpengaruh, adalah dengan mencontoh langsung dari kyai dan para ustadz. Dalam budaya pesantren yang bergaya hierarkis dan penuh rasa hormat, perilaku kyai seperti sederhana, adil, dan tidak memihak menjadi contoh nyata dari cara menerapkan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial. Melalui pengamatan dan pembelajaran melalui contoh, nilai-nilai ini dipelajari secara alami, efektif, dan mengakar, jauh lebih kuat daripada instruksi verbal saja. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan Pondok Pesantren Al Huda terletak pada kemampuannya menyelipkan nilai Pancasila ke dalam budaya pesantren yang sudah berkembang. Dengan menggunakan bahasa dan medium budaya yang sudah dikenal, seperti kitab kuning, tradisi, dan hubungan antara kyai dan santri, nilai-nilai itu bisa diterima secara alami, otentik, dan tidak dipaksa. Model ini tidak hanya melahirkan santri yang beragama kuat, tetapi juga menjadi warga negara yang memiliki rasa nasionalisme tinggi, sehingga bisa menjadi referensi berharga dalam penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia.

Referensi

- Anggraeni, dkk. (2023). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Sumatera Barat: Hei Publisng.
- Bappenas. (2019). *Laporan Kajian Indeks Ketahanan Nasional Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Detik.com. (2023, 5 April). *Globalisasi Adalah: Pengertian Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampak*. DetikEdu. Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6655870/globalisasi-adalah-pengertian-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampak>
- Dewantara, Ki Hajar. (1937). *Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2020). *The Pesantren Tradition: The Role of the Kyai in the Maintenance of Traditional Islam in Java*. Tempe: Monograph Series Press, Arizona State University.
- Hasan, M. I., & Qodir, Z. (2022). *Dinamika Pesantren di Indonesia: Antara Tradisi dan Modernitas*. Yogyakarta: LKiS.
- Hendri, dkk. (2018). [Judul lengkap perlu dilengkapi - tidak tersedia dalam naskah].

- Jalan Damai. (2025, Agustus 12). Kyai di Persimpangan Zaman. Diakses dari <https://jalandamai.org/kyai-di-persimpangan-zaman.html>
- Kemdikbud. (2019). Laporan Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- LIPI. (2020). *Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Era Digital*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Mastuhu. (1994). *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Jakarta: INIS.
- Maunah, B. (2015). *Tradisi Intelektual Santri: Membangun Kemandirian dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta: Teras.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muflihini, A. (2024). *Islam dan Civil Society: Studi Pemikiran Azyumardi Azra dalam Membangun Gerakan Kultural di Indonesia*. Moraref Kemenag. Surabaya: UIN Sunan Ampel. [Tidak tersedia DOI]
- Notonagoro. (1974). *Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: BP Kedaulatan Rakyat.
- PPIM UIN Jakarta. (2021). *Survei Nasional: Peran Pesantren dalam Membentuk Karakter Pemuda Indonesia*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah.
- Pusat Penelitian Kebijakan. (2018). *Evaluasi Dampak Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada Satuan Pendidikan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud.
- Qodir, Z., & Hasan, N. (2021). Pesantren dan Tantangan Modernitas: Membaca Kembali Pemikiran Martin van Bruinessen tentang Tradisi Intelektual Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Islam*, 12(2), 145-160. [Tidak tersedia DOI]
- Raharjo, S. B., & Mulyono, T. (2023). Degradasi Nilai Pancasila pada Generasi Milenial di Era Globalisasi. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 67-82. DOI: 10.22146/jkn.78901
- Rahim, M. (2026). *Pendidikan Karakter Berbasis Multikultural*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo. Diakses dari <https://dosen.ung.ac.id/0018075910/home/2026/1/16/pendidikan-karakter-berbasis-multikultural.html>
- Ramasari, K. L., & Azani, M. Z. (2025). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Ruang Lingkup Pendidikan Islam Pada Madrasah Aliyah Al-Mukmin Ngruki Sukoharjo. *Instructional Development Journal*, 8(3), 641-652. DOI: <http://dx.doi.org/10.24014/idj.v8i3.38914>
- Syukron. (2025, Desember 15). Pesantren Melawan Fanatisme untuk Kerukunan. Jalan Damai. Diakses dari <https://jalandamai.org/pesantren-melawan-fanatisme-untuk-kerukunan.html>